# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Stabilitas ekonomi merupakan entitas multidimensional yang dipengaruhi oleh determinan strategis seperti penguatan infrastruktur, eskalasi pendapatan masyarakat, sinergi kerja sama internasional, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, stabilitas ini merefleksikan resiliensi suatu negara dalam memitigasi dampak krisis ekonomi, inflasi, mengelola kelangkaan sumber daya, serta merespons dinamika tantangan global secara adaptif (Li et al., 2021).

Keseimbangan dan keberlanjutan ekonomi, yang dimanifestasikan melalui stabilitas makroekonomi, mencakup pengendalian inflasi, optimalisasi penyerapan tenaga kerja, serta keseimbangan neraca pembayaran. Kondisi ekuilibrium tersebut berperan krusial dalam menyediakan fondasi yang stabil bagi aktivitas ekonomi di sektor investasi maupun konsumsi. Dalam jangka panjang, stabilitas ini tidak hanya mendukung resiliensi ekonomi, tetapi juga mengakselerasi pembangunan nasional melalui pemerataan kesejahteraan dan penguatan struktur ekonomi secara holistik (Comporek et al., 2022).

Dalam perspektif makro ekonomi global, pemeliharaan stabilitas ekonomi menjadi urgensi utama yang memerlukan sistem keuangan yang resilien terhadap berbagai guncangan sistemik. Fondasi stabilitas yang kokoh tercipta melalui tata kelola sektor keuangan yang sehat, penerapan kebijakan makroprudensial yang responsif, serta pengendalian risiko yang sistematis. Upaya kolektif ini merupakan

determinan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang stabil sekaligus berkelanjutan (Carrasco-gallego, 2021).

Secara fundamental, stabilitas ekonomi merepresentasikan kapabilitas masyarakat dalam mengakses sumber daya dan layanan esensial demi pemenuhan taraf hidup yang layak di tengah berbagai fluktuasi siklus ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang persisten merupakan cerminan dari penguatan produktivitas, akselerasi investasi, serta optimalisasi penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, stabilitas ini sangat rentan terhadap variabel eksternal seperti ketahanan energi, volatilitas inflasi, dan dinamika geopolitik. Ketidakpastian pasokan energi, misalnya, berpotensi memicu disrupsi distribusi dan eskalasi harga yang secara sistemik dapat mendegradasi stabilitas makro ekonomi suatu negara (Banna et al., 2023).

Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan lingkungan pertumbuhan ekonomi yang meningkat menyebabkan kebutuhan energi semakin tinggi sehingga diperlukan sumber energi berkelanjutan. Pengelolaan limbah dan pengembangan energi alternatif di pandang mampu mendukung stabilitas ekonomi karena dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menekan dampak lingkungan dan biaya sosial ekonomi (Naveenkumar et al., 2023).

Kondisi stabilitas makro ekonomi pada beberapa negara menunjukkan perkembangan yang cenderung positif pasca terjadinya krisis ekonomi global. Peningkatan tersebut terlihat dari membaiknya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya investasi, serta tumbuhnya optimisme masyarakat dan pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian. Kebijakan ekonomi pemerintah yang didukung

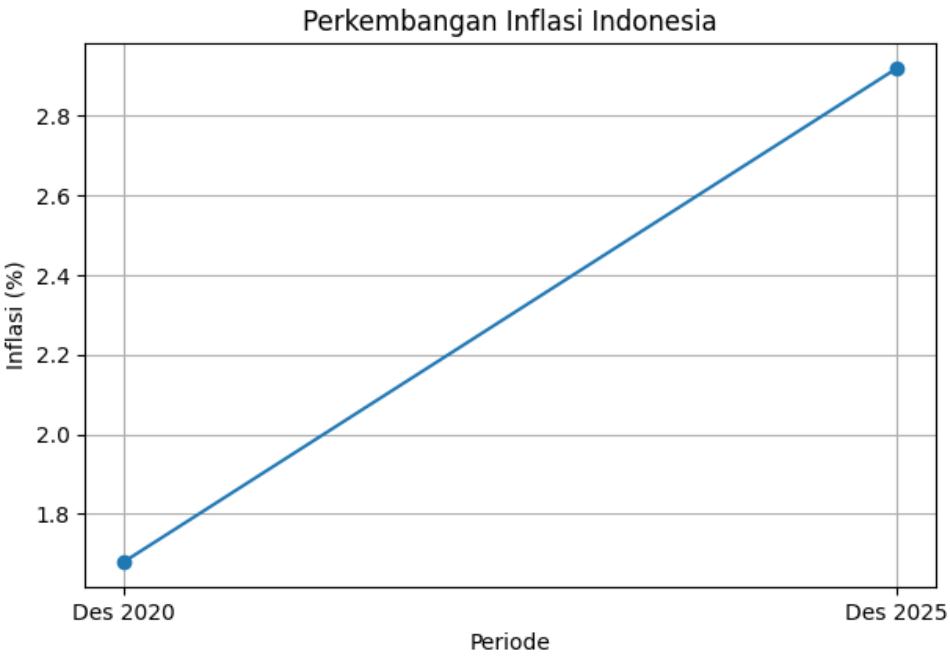
oleh pengelolaan fiskal dan moneter yang baik mampu mendorong terciptanya stabilitas ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan (Comporek Michałand Kowalska & Misztal, 2022).

Meskipun demikian, di balik gambaran umum yang membaik tersebut, terdapat indikator spesifik yang senantiasa menjadi perhatian krusial dalam menjaga keseimbangan ekonomi, salah satunya adalah dinamika harga atau inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran stabilitas makroekonomi (Macroeconomic Stability - MSP) yang digunakan dalam penelitian ini. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menjadi sebuah permasalahan serius karena dapat mengganggu keseimbangan ekonomi internal negara (Comporek et al., 2022).

Inflasi merupakan fenomena ekonomi berupa kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan ini berlaku bagi sebagian besar kebutuhan masyarakat, bukan hanya terjadi pada satu atau dua jenis barang saja. Dampak utamanya terlihat dari menurunnya nilai mata uang, di mana masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk memperoleh jumlah barang yang sama. Kondisi ini muncul akibat ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, yang dipengaruhi oleh faktor jumlah uang yang beredar, nilai tukar, maupun biaya produksi. Berdasarkan besarannya, inflasi dibagi menjadi empat kategori: inflasi ringan (di bawah 10% per tahun), inflasi sedang (10%–30% per tahun), inflasi tinggi (30%–100% per tahun), dan hiperinflasi (di atas 100% per tahun) (Saefulloh et al., 2023).

Inflasi dipahami sebagai serangkaian kenaikan harga barang dan jasa yang berlangsung terus-menerus dalam periode tertentu. Kenaikan harga yang hanya berlangsung sebentar atau terjadi pada musim tertentu tidak termasuk dalam definisi ini. Dalam lingkup ekonomi makro, fenomena ini menjadi tolak ukur yang menggambarkan berkurangnya nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang ada. Kondisi tersebut dapat timbul karena permintaan yang melebihi ketersediaan barang, kenaikan biaya produksi, hingga faktor struktur ekonomi itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan berupa penurunan kemampuan membeli masyarakat serta ketidakpastian dalam merencanakan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian laju inflasi sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan perekonomian negara dan kesejahteraan seluruh masyarakat (Mulyani, 2020).

Stabilitas makro ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh pergerakan tingkat inflasi sebagai indikator fundamental. Merujuk pada data yang dirilis oleh Bank Indonesia, tingkat inflasi pada desember 2020 berada pada angka 1.68 %, menglami kenaikan sebesar 2.92 %, pada desember 2025 yang memberikan implikasi langsung terhadap efektivitas kebijakan moneter nasional untuk melihat kondisi stabilitas makro ekonomi secara empiris penelitian menggunakan perkembangan inflasi di Indonesia sebagai berikut : (Bi-, 2023).




**Gambar 1.1 Tingkat inflasi 2020-2025**

Permasalahan inflasi berkaitan erat dengan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang serta jasa dalam perekonomian. Inflasi terjadi ketika permintaan masyarakat meningkat secara berlebihan sementara kemampuan produksi atau penawaran tidak mampu mengejarnya. Penyebab inflasi juga bisa muncul akibat kenaikan jumlah uang yang beredar, kebijakan pemerintah, pemberian kredit usaha yang meluas, hingga hambatan dalam penyesuaian kapasitas produksi. Selain itu, masalah yang teridentifikasi adalah dampak inflasi tidak berlaku sama di semua kondisi, hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi berbeda-beda antarnegara maupun antarperiode waktu, sehingga tidak ada satu solusi kebijakan yang bisa diterapkan secara umum dan pasti berhasil (Sekarsari et al., 2024).

Sebagaimana sulitnya merumuskan solusi kebijakan inflasi yang bersifat universal, mekanisme penyebaran risiko transisi iklim dalam sektor keuangan pun masih menyisakan celah riset yang memerlukan kajian lebih lanjut. Risiko iklim dapat mengganggu produksi dan distribusi, sehingga berpotensi memengaruhi harga dan inflasi**,** risiko transisi iklim muncul dari peralihan ke ekonomi rendah karbon, berdampak pada aset perbankan lalu menyebar ke perusahaan lewat kredit. Mekanisme penyebaran ini belum banyak dikaji, serta belum jelas seberapa efektif kinerja ESG dan dimensinya dalam mengurangi risiko tersebut (Ling et al., 2025).

permasalahan risiko iklim yang tercantum berkaitan erat dengan ketidakpastian dampak kebijakan iklim terhadap nilai aset keuangan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Terdapat kekhawatiran mengenai kurangnya metode pengukuran risiko yang terstandar dan terpadu, terutama dalam menilai dampak jangka panjang terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Masalah lain meliputi ketidakseimbangan informasi antara pihak keuangan dan entitas usaha terkait eksposur risiko iklim, yang menghambat pengambilan keputusan yang tepat dan mitigasi risiko yang efektif. Selain itu, risiko fisik akibat perubahan iklim seperti bencana alam juga tercatat sebagai masalah yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan dan meningkatkan kerentanan sistem ekonomi (Reboredo & Ugolini, 2022).

Risiko iklim berkaitan dengan kebijakan pengurangan emisi yang belum memiliki standar pengukuran seragam dan jelas. Terdapat kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan lembaga keuangan mengenai besarnya eksposur risiko

iklim pada aset dan portofolio investasi. Risiko fisik akibat perubahan iklim seperti bencana alam berpotensi menurunkan nilai aset dan mengganggu kelangsungan usaha. Selain itu, strategi mitigasi yang teruji dan efektif untuk menjaga stabilitas keuangan dari dampak risiko iklim masih sangat terbatas (Zhao et al., 2025).

Risiko utama muncul dari perubahan struktur ekonomi akibat transisi rendah karbon, di mana industri berbahan bakar fosil menurun dan asetnya berisiko tidak bernilai atau terdepresiasi mendadak. Dampak ini mengancam stabilitas keuangan lewat penurunan nilai aset, gagal bayar utang, dan ketidakpastian investasi. ESG menjadi solusi kunci lewat dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk mengelola perubahan ini. Penerapan ESG membantu merancang strategi adaptasi, menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan menjaga nilai aset tetap aman (Semieniuk et al., 2021).

Belum ada standar ukur seragam dan kesenjangan informasi antara pelaku usaha dan lembaga keuangan. ESG memberikan standar pelaporan dan penilaian yang seragam, sehingga semua pihak memiliki data yang sama dan jelas. Strategi mitigasi berbasis ESG terbukti efektif menurunkan risiko fisik maupun transisi, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Penerapannya menjadi cara paling teruji menjaga keberlanjutan usaha dan kestabilan sistem keuangan. Meskipun standardisasi ESG mampu memitigasi risiko sistemik dan meningkatkan keberlanjutan usaha, efektivitas implementasinya dalam skala makro tetap bergantung pada kesiapan instrumen moneter yang menaunginya, termasuk dalam kerangka ekonomi syariah.(Report, 2023).

Kebijakan moneter berperan penting namun berbeda prinsip konvensional berbasis bunga, syariah bebas riba dan gharar. Berdasarkan data 2015–2024, publikasi terbanyak dari Indonesia, sedangkan AS memiliki jaringan kerja sama terkuat. Masalah utamanya: instrumen terbatas, sulit menyelaraskan kebijakan, dan transmisi kurang efektif. Penelitian masih terpusat, aturan belum seragam, dan pendekatan terbatas, sehingga butuh pengembangan lebih lanjut (D Tegas Pribadi1, E Suprayitno2, 2025).

Pemanfaatan instrumen investasi mudharabah dan surat berharga syariah menjadi fondasi kebijakan moneter syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi tanpa melibatkan unsur riba, meskipun secara operasional memiliki kemiripan dengan mekanisme moneter pada umumnya. Masalah signifikannya terletak pada ruang lingkup instrumen yang sempit, inkonsistensi regulasi, serta perdebatan teologis mengenai jaminan pihak ketiga. Kesenjangan antara riset ilmiah dan pemahaman pelaku pasar turut menjadi faktor yang menghambat keberhasilan kebijakan ini di lapangan (Reviews & Issoufou, 2019).

Meskipun kebijakan moneter syariah telah mengadopsi instrumen seperti SBIS dan instrumen cadangan berbasis prinsip non-komoditas uang, namun terdapat diskoneksi dalam efektivitas operasionalnya. Masalah fundamental muncul dari keterbatasan kanal likuiditas dan rendahnya pemahaman pelaku pasar terhadap skema non-konvensional. Ketidakmampuan untuk menyelaraskan kebijakan ini dengan rezim suku bunga global semakin mengekspos kerentanan sistem keuangan syariah, khususnya dalam memitigasi risiko sistemik di masa krisis (Kurniawan et al., 2022).

Kerentanan sistem keuangan syariah dalam menghadapi krisis tersebut menjadi kian krusial mengingat tekanan makroekonomi, khususnya inflasi, memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi. Adanya perdebatan dampak inflasi terhadap ekonomi, bukti empiris menunjukkan inflasi berpengaruh negatif signifikan, di mana kenaikan 1% inflasi menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,25%. Inflasi tinggi (di atas 10%) merusak ekonomi, terlihat jelas saat tahun 1998 inflasi mencapai 77,63% dan ekonomi tumbuh negatif. Selain itu, inflasi hanya menjelaskan 74,76% perubahan ekonomi, sisanya dipengaruhi faktor lain yang belum diketahui, serta dampaknya berbeda antara jangka pendek dan panjang (Management, 2020).

Mengingat adanya variabel di luar inflasi yang turut memengaruhi volatilitas ekonomi tersebut, penguatan aspek Environmental, Social, dan Governance (ESG) muncul sebagai solusi strategis untuk menutup celah ketidakpastian melalui transparansi dan tata kelola risiko yang lebih komprehensif. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji risiko industri baru, sedangkan risiko industri menurun mekanismenya belum dipahami sepenuhnya. ESG menjawab celah ini dengan menyediakan kerangka ukur, transparansi data, dan evaluasi risiko yang lengkap. Tata kelola yang baik dalam ESG memastikan pengambilan keputusan yang sadar risiko serta mengurangi ketidaktahuan dampak transisi. Hal ini membuat penyebaran risiko ke sistem keuangan dapat dikendalikan dan diprediksi lebih akurat (F Elderson, 2020).

Dengam demikian**,** Secara keseluruhan, stabilitas makroekonomi Indonesia berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter syariah, risiko

iklim, dan ESG. Ketiga aspek tersebut perlu dikaji secara bersama karena risiko iklim dapat memengaruhi kondisi ekonomi, ESG mendukung keberlanjutan dan pengelolaan risiko, sedangkan kebijakan moneter syariah berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keterkaitan ketiga faktor tersebut terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia.

Dari fenomena antarvariabel di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan novelty yang terletak pada penggabungan kebijakan moneter syariah, risiko iklim, ESG, dan stabilitas makroekonomi dalam satu model penelitian. Penelitian ini tidak hanya melihat hubungan masing-masing variabel, tetapi juga menganalisis keterkaitannya dalam jangka pendek dan jangka panjang menggunakan metode VECM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai pentingnya integrasi kebijakan moneter syariah, pengelolaan risiko iklim, dan penerapan ESG dalam mendukung stabilitas makroekonomi Indonesia.

Dengan penelitian yang berbasis pada metode VAR/VECM yang menganalisis hubungan dinamis antarvariabel, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan novelty melalui penggabungan kebijakan moneter syariah, risiko iklim, ESG, dan stabilitas makroekonomi dalam satu model penelitian. Analisis ini memungkinkan penulis untuk melihat keterkaitan antarvariabel, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya integrasi kebijakan moneter syariah,

pengelolaan risiko iklim, dan prinsip keberlanjutan dalam mendukung stabilitas makroekonomi Indonesia.

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui :

1. Apakah terdapat hubungan kointegrasi atau keseimbangan dinamis dalam jangka panjang yang menghubungkan kebijakan moneter syariah, risiko iklim, penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), dan stabilitas makroekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana arah, besarnya, dan signifikansi pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap pencapaian stabilitas makroekonomi di Indonesia, baik dalam kerangka waktu jangka pendek maupun jangka panjang?
3. Apakah perubahan dan peningkatan risiko iklim memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kestabilan makroekonomi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang?
4. Apakah prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berperan sebagai variabel pemediasi yang berpengaruh positif dan signifikan dalam memperkuat hubungan antara kebijakan moneter syariah, risiko iklim, dan stabilitas makroekonomi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang?

## 1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan keberadaan hubungan kointegrasi atau keseimbangan jangka panjang antara kebijakan moneter syariah, risiko iklim, penerapan ESG, dan stabilitas makroekonomi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis arah, besarnya, dan signifikansi pengaruh kebijakan moneter syariah terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk menguji dan menganalisis dampak perubahan risiko iklim yang bersifat negatif dan signifikan terhadap tingkat stabilitas makroekonomi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan peran ESG sebagai variabel pemediasi yang memperkuat hubungan antara kebijakan moneter syariah, risiko iklim, dan stabilitas makroekonomi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Islamic Economics, kebijakan moneter syariah, ekonomi lingkungan, dan stabilitas makro ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hubungan

antara kebijakan moneter syariah, risiko iklim, ESG, dan stabilitas makro ekonomi di Indonesia.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Pemerintah dan Otoritas Kebijakan**

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim serta mendukung penguatan stabilitas makro ekonomi melalui pendekatan keuangan berkelanjutan dan kebijakan moneter syariah.

2. **Bagi Lembaga Keuangan**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, mengenai pentingnya penerapan prinsip ESG dan pengelolaan risiko iklim dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan ketahanan ekonomi.

3. **Bagi Akademisi**

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian akademik bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin mengembangkan penelitian mengenai kebijakan moneter syariah, risiko iklim, ESG, dan stabilitas makro ekonomi.

4. **Bagi Masyarakat**

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya stabilitas makro ekonomi, pengendalian risiko iklim,

serta penerapan prinsip keberlanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.